

2023



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan pembangunan sektor urusan Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023.

Gambaran keberhasilan dan tidak tercapainya misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2023, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi di masa yang akan datang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini sehingga dapat selesai tepat waktu. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian laporan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, Januari 2024

Pt. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur *le*


le
Semuel Halundaka, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660226 199903 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan media pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun yang menjadi perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara ringkas dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian kategori **Sangat Berhasil**. Hal ini ditunjukkan dari data capaian kinerja pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,25	1,31	100 %
		2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12	12,52	100 %
2	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	3	23,56	100 %
RATA-RATA CAPAIAN						100%

Ketercapaian target kinerja tahun 2023 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumber daya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan program/kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsi

yang diemban, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan dan permasalahan yang selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

Adapun tingkat pencapaian kinerja yang baik akan dipertahankan dan ditingkatkan menjadi semakin baik pada tahun-tahun mendatang, sedangkan permasalahan yang ada dan muncul akan dicarikan jalan keluarnya sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya Manusia	5
1.6 Dasar Pelaksanaan.....	8
1.7 Isu Strategis	8
1.8 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	10
2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur	10
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	11
2.2 Rencana Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	13
2.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
2.2.2 Program Dukungan Dana APBN dan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	19
2.2.3 Indikator	19
2.3 Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	29

3.2 Evaluasi Capaian Kinerja	31
3.3 Akuntabilitas Keuangan	51
3.3.1 Anggaran Bersumber Dari APBD	52
3.3.2 Anggaran bersumber dari APBN	54
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	55

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT	5
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	12
Tabel 2.2	Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri dan Pengembangan Perdagangan NTT	14
Tabel 2.3	Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2023	19
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Urusan Perindustrian	20
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Urusan Perdagangan	21
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
Tabel 2.7	Dukungan Anggaran APBD dan APBN Tahun 2023	26
Tabel 2.8	Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023	27
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	29
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2023	30
Tabel 3.3	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Industri Pengolahan).....	32
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1	32
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya	33
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	33
Tabel 3.7	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Perdagangan)	36
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2	37
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya	38
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	38
Tabel 3.11	Kenaikan/penurunan Harga Bahan Kebutuhan Pokok.....	41
Tabel 3.12	Distibusi Kupon Belanja pada Kegiatan Pasar Murah	42
Tabel 3.13	Badan Usaha Yang Telah Melakukan Kalibrasi.....	44
Tabel 3.14	Nilai Ekspor non migas (US \$) Tahun 2022 - 2023.....	46
Tabel 3.15	Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1	47
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	47
Tabel 3.17	Target Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	51
Tabel 3.18	Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD TA 2023	52
Tabel 3.19	Rincian Realisasi Belanja APBD TA 2023	52
Tabel 3.20	Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBN TA 2023	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	4
Gambar 3.1 Nilai Ekspor Provinsi Asal Menurut Negara Tujuan Tahun 2023	48
Gambar 3.2 Nilai Ekspor Sepuluh Kelompok Komoditas Non Migas NTT Tahun 2023	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat menjawab tantangan urusan perindustrian dan perdagangan. Sebagai dinas teknis, keberadaan dinas ini menjadi salah satu pilar untuk mendukung pelaksanaan urusan yang telah dibebankan dan membantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dituntut untuk mewujudkan *good governance and clean government* yang merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan LKIP ini adalah untuk memberi informasi mengenai capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran .

Sedangkan tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perdagangan.

a. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Tipe A. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, terhadap Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 sebagaimana di atas perlu diubah dan disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.

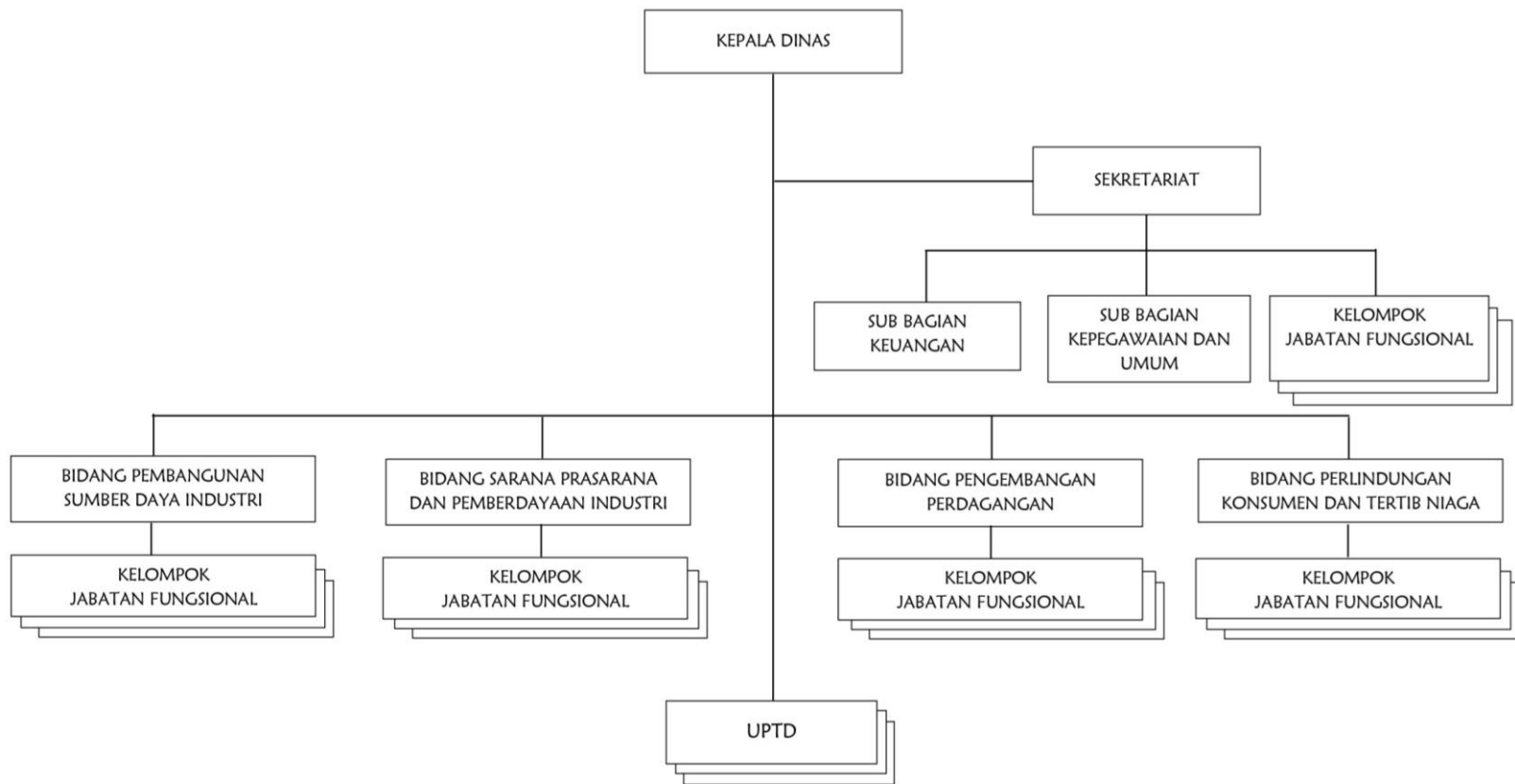
Selain peraturan diatas, ada juga Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menjadi dasar terbentuknya UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di Kupang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara disajikan dalam Bagan Struktur Organisasi Timur sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 22 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan tugas dan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gambaran umum potensi sumber daya manusia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan pembagian jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan.

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Pegawai	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	PNS	63	29	34
2	CPNS	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	62	32	30
Jumlah		125	61	64

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Pegawai	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
A. Dinas Induk (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT)				
1	PNS	52	23	29
2	CPNS	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	31	17	14
Jumlah		83	40	43
B. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				
1	PNS	11	6	5
2	CPNS	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	4	2	2
Jumlah		15	8	7
C. Deskranasda Provinsi NTT				
1	PNS	-	-	-
2	CPNS	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	27	12	15
Jumlah		27	12	15

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2023

Dari Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara sampai dengan Desember tahun 2023 berjumlah 63 orang yang terdiri dari 29 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Sedangkan tenaga kontrak berjumlah 62 orang yang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 30 orang perempuan.

Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					
		S2	S1	Diploma	SMA	SMP	SD
1.	Sekretariat	2	14	1	4	-	-
2.	Bidang PSDI	2	5	-	1	-	-
3.	Bidang SPPI	1	6	1	1	-	-
4.	Bidang PP	-	10	-	-	-	-
5.	Bidang PKTN	1	2	1	-	-	-
6.	UPTD PSMB	2	5	-	4	-	-
J U M L A H		S2 = 8	S1 = 42	Diploma = 3	SMA = 10	SMP = 0	SD = 0

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2023

Tabel 1.3 di atas terlihat bahwa ada 42 orang dari total 63 aparatur atau 66% ASN pada Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pendidikan sarjana (S1). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur cukup memadai dalam mendukung kinerja pelayanan perangkat daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keadaan ini memberikan harapan akan ketersediaan SDM yang lebih dinamis dan responsif terhadap inovasi dalam menangani permasalahan urusan perdagangan dan perindustrian di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan komposisi pegawai pada tabel 1.3 di atas maka jumlah pegawai berdasarkan Golongan sebagai berikut:

- Golongan IV sebanyak 7 orang;
- Golongan III sebanyak 51 orang;
- Golongan II sebanyak 5 orang;
- Golongan I tidak ada.

Uraian komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Golongan

Golongan	Sekretariat		Bidang PSDI		Bidang SPPI		Bidang PP		Bidang PKTN		UPTD PSMB		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
IV b	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
IV a	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	5
III d	1	5	1	2	1	2	4	4	-	1	-	4	25
III c	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	8
III b	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6
III a	2	2	-	1	1	1	1	1	-	2	1	-	12
II d	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4
II c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
II b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
II a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Total	11	10	2	5	4	5	5	5	1	4	6	5	63

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2023

Dari jumlah tersebut di atas terdapat 9 pejabat struktural, 11 pejabat fungsional dan 43 jabatan administrasi (pelaksana).

Komposisi ASN berdasarkan Jabatan/Eselon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jabatan/Eselon

Jabatan/ Eselon	Sekretariat		Bidang PSDI		Bidang SPPI		Bidang PP		Bidang PKTN		UPTD PSMB		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
III	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	6
IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Fungsional Tertentu	2	2	-	1	1	1	2	1	-	2	-	-	12
Pelaksana	8	7	2	3	3	3	3	3	-	2	5	2	41
Total	11	10	2	5	4	5	5	5	1	4	6	5	63

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2023

Selain Sumber Daya Manusia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki aset/modal berupa tanah, gedung kantor, kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 serta sarana dan prasarana kerja lainnya untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja.

1.6 DASAR PELAKSANAAN

Dasar penyusunan dokumen LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sebagai berikut:

1. TAP MPR RI Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.7 ISU STRATEGIS

Sebagaimana tercermin dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dengan demikian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi;
- 2) Peningkatan kapasitas ekspor dan nasional;
- 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan NTT dalam rangka meningkatkan pemasaran regional, nasional dan ekspor;
- 4) Menyediaan Informasi harga dan pasar secara *real time*;
- 5) Pendampingan bagi UKM untuk pemasaran berbasis *online* kedepan (sesuai perkembangan Revolusi Industri 4.0);
- 6) Pengawasan barang dan jasa yang beredar;

- 7) Peningkatan perlindungan konsumen melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang perangkat daerah, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan jumlah pegawai, dasar pelaksanaan dan sistematika penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2023).

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil. Selanjutnya disajikan akuntabilitas keuangan, cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan yang menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan yang akan dicapai dalam periode 2018-2023. Renstra menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu, Renstra merupakan pendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah periode 2018-2023 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur

Visi Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang tertuang pada RPJMD Perubahan 2018-2023 yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Perwujudan visi ini ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan yakni:

1. Misi 1, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil;
2. Misi 2, Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*ring of beauty*);
3. Misi 3, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan;
4. Misi 4, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Misi 5, Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Dari kelima misi di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung misi pertama dan misi kedua. Selama 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

melaksanakan 1 (satu) program yakni Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian, dimana pelaksanaan program tersebut diarahkan untuk mendukung Misi Pertama dan Misi Kedua serta program lintas sektor pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Program NTT Bangkit.

Pelaksanaan Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang searah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian *outcome* kegiatan ditujukan untuk mendukung sasaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah, terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas, serta terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities* dan *Awareness*).

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
				2021	2022	2023
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	1,31	2,15	3,50
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi	Menguatnya peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar	Pertumbuhan IKM dengan Produk Unggulan Lokal Berorientasi Ekspor (%)	3,50	4,00	4,50
3	Meningkatnya jaringan distribusi produk daerah ke pasar regional dan internasional	Terjaganya kestabilan harga barang dan terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	8,50	8,50	8,50
			($KV_{pt} = S_n/p \times 100\%$) Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas (%)	5,00	10,00	15,00
4	Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	95,00	95,00	95,00
			Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku (%)	-	30,00	70,00
5	Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Organisasi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi (%)	80,00	85,00	90,00

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan industri dan pengembangan perdagangan NTT selama periode 2018-2023.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan RPJMD Perubahan Provinsi NTT, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri dan Pengembangan Perdagangan NTT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil			
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah	Meningkatnya Kualitas dan Keragaman Produk Industri Unggulan Daerah	1) Meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam	1) Peningkatan kompetensi teknis dan manajerial Wirausaha Industri, Tenaga Kerja Industri dan Pembina Industri 2) Pengembangan industri yang berbasis Sumber Daya Alam 3) Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran SDA
		2) Mengembangkan dan Memanfaatkan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi	4) Pemanfaatan teknologi industri dalam pengembangan budaya industri dan/atau kearifan lokal 5) Fasilitasi masyarakat untuk mendorong kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan produk 6) Fasilitasi ketersediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi
		3) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Industri	7) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait perijinan di bidang industri 8) Pemantauan, pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administrasi untuk pelanggaran perijinan industri, terutama terhadap IUI, IUKI dan IPKI
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi	Menguatnya peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar	1) Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah dalam Rantai Nilai (<i>Value Chain</i>) dan Rantai Pasokan (<i>Supply Chain</i>) yang Terintegrasi dengan Industri	1) Peningkatan pertumbuhan industri di daerah tujuan Pariwisata <i>Estate</i> dan industri yang berbasis komoditas unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota. 2) Penguatan kapasitas IKM melalui peningkatan kemampuan sentra, UPT, Fungsional Penyuluh dan Konsultan IKM; serta kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, Litbang, Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil			
		Besar	terkait 3) Bimtek, fasilitasi bantuan, akses pembiayaan, promosi dan pengembangan produk unggulan daerah 4) Fasilitasi pola kemitraan/ kerjasama antara industri kecil, industri menengah, industri besar dan sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya.
		2) Memfasilitasi Industri, Industri Hijau, dan Standardisasi Industri	5) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri 6) Fasilitasi Pembangunan Sentra IKM, minimal 1 (satu) Sentra di setiap Kabupaten/Kota, dan/atau Sentra Industri Kreatif 7) Penyusunan rancangan regulasi teknis dan standardisasi industri dalam pengembangan produk unggulan
		3) Menyediakan Data dan Informasi Industri	8) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) NTT 9) Penyediaan data dan informasi industri yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 10) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem Informasi
Meningkatnya jaringan distribusi produk daerah ke	Terjaganya kestabilan harga barang dan terciptanya diversifikasi	1) Meningkatkan kontribusi perdagangan besar, kecil serta sektor real dalam	1) Peningkatan pertumbuhan perdagangan di daerah tujuan Pariwisata estate 2) Fasilitasi Peningkatan SDM, Pembiayaan dan bantuan peralatan di

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil			
pasar regional dan internasional	pasar dan produk unggulan daerah	peningkatan PDRB NTT	daerah tujuan pariwisata estate
		2) Meningkatkan fasilitas dan pemasaran produk dalam Negeri	3) Penguatan aktivitas perdagangan melalui penyediaan dan peningkatan sarana perdagangan untuk kelancaran pemasaran produk dalam Negeri
		3) Meningkatkan distribusi produk lokal Unggulan Daerah	4) Peningkatan arus distribusi untuk pemerataan barang dan jasa di semua wilayah
		4) Meningkatkan akses pasar dalam Negeri	5) Penguatan jejaring pemasaran dan perluasan akses pasar produk unggulan daerah
			6) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal Unggulan Daerah
		5) Meningkatkan sistem informasi perdagangan dalam negeri	7) Peningkatan sistem informasi perdagangan dalam negeri
		6) Meningkatkan pengendalian harga dan distribusi barang jasa	8) Peningkatan koordinasi dengan pelaku usaha dan pihak terkait dalam rangka pengendalian harga dan distribusi Bapok serta Banting
		7) Meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas melalui hilirisasi	9) Pengembangan kinerja perdagangan luar negeri melalui Skema Kerjasama Selatan Selatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil			
		8) Meningkatkan Kualitas Produk ekspor melalui Fasilitas standarisasi produk ekspor	10) Peningkatan mutu produk ekspor sesuai standar yang berlaku 11) Peningkatan SDM Pelaku Usaha dan kelembagaan ekspor
		9) Meningkatkan aktivitas ekspor dan pengendalian impor melalui fasilitas perdagangan;	12) Pengendalian impor bahan baku dan barang modal;
		10) Menjamin aktivitas perdagangan luar negeri sesuai Kebijakan yang berlaku	13) Koordinasi dan sinergi antar stakeholder dan pelaku usaha dalam penerapan kebijakan perdagangan luar negeri dalam aktivitas perdagangan luar negeri
Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga	1) Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	1) Mengembangkan standarisasi, mutu produk, regulasi pro konsumen	1) Peningkatan pengujian/sertifikasi mutu barang dan jasa yang beredar
		2) Pemberdayaan konsumen	2) Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dan Konsumen terhadap K3I dalam produksi dan konsumsi produk
		3) Penguatan kapasitas kelembagaan laboratorium pengujian mutu dan	3) Pembentukan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di Kabupaten/ Kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil			
		kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota	
Meningkatkan Kualitas Kinerja organisasi	1) Meningkatnya sarana dan prasarana kerja	1) Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar	1) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai tuntutan kerja
	2) Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan	2) Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan	2) Penyediaan Sistem informasi publik dan pelaporan secara <i>online</i>
	3) Meningkatnya kompetensi SDM	3) Peningkatan pelatihan teknis sumber daya manusia	3) Peningkatan profesionalisme aparatur

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

2.2.2 Program Dukungan Dana APBN dan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk menjalankan program kegiatan tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat anggaran dana APBN dan APBD. Rincian besarnya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2023

No.	SUMBER DANA/PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)
A.	DANA APBN	
	1 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.373.700.000,-
	2 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	468.329.000,-
	3 Program Perdagangan Luar Negeri	546.732.000,-
	Jumlah	2.388.761.000,-
B.	DANA APBD	
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9.336.615.118,-
	2 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	524.999.700,-
	3 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	591.246.230,-
	4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.000.000.000,-
	5 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	732.851.800,-
	Jumlah	12.185.712.848,-

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 2.3 di atas terlihat bahwa pelaksanaan program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2023 didukung dana APBN sebesar Rp2.388.761.000,- (Dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan dana APBD sebesar Rp 12.185.712.848,- (Dua belas miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

2.2.3 Indikator

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas serta mandat (*core business*) yang diemban.

1. Urusan Perindustrian

Sektor industri mendukung pencapaian visi dan misi dari pencapaian kinerja pada aspek daya saing daerah dengan indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB NTT.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2022 tanggal 15 September 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) program urusan perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023
1	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	NA	1,2	1,25	1,25

Sumber Data : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

2. Urusan Perdagangan

Ada 2 (dua) sasaran dalam pencapaian Indikator makro Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan urusan perdagangan yaitu Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan dan Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional masing-masing sasaran terdapat 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2022 tanggal 15 September 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan perdagangan pada Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023
1	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	NA	10	11	12
2	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	NA	2	3	3

Sumber Data : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan beserta indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan rencana kinerja akan memudahkan dalam mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun dengan melakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja utama. Namun dalam perjalanan Tahun 2023, terjadi perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, serta karena adanya *redesign* (perubahan) anggaran.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,21	1,25	$\frac{\text{Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,05	12	$\frac{\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	100	3	$\frac{\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } (n-1)}{\text{Nilai ekspor tahun } (n-1)} \times 100\%$

B. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

No.	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 12.185.712.848 ,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 9.336.615.118 ,-	Realisasi minimal 90%
	2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 524.999.700 ,-	Realisasi minimal 85%
	3. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 591.246.230 ,-	Realisasi minimal 85%
	4. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 1.000.000.000 ,-	Realisasi minimal 85%
	5. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 732.851.800 ,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 504.000.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 12.689.712.848 ,-	
2)	APBN		
	Program	Rp. 2.388.761.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 1.373.700.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 468.329.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	3. Perdagangan Luar Negeri	Rp. 546.732.000 ,-	Realisasi minimal 90%

C. Belanja menggunakan Aplikasi E-Purchasing minimal 40% dari Pagu belanja Pengadaan barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 04 Februari 2023;

- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);**
- F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;**
- G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut :**
 - 1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 - 2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) Jenis;**
- I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;**
- J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**
- K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Infromatif (76,99);**
- L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.**

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,21	1,25	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,05	12	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	100	3	$\frac{\text{Nilai Ekspor Tahun } n - \text{Nilai Ekspor Tahun } (n - 1)}{\text{Nilai Ekspor Tahun } (n - 1)} \times 100\%$

Sumber Data : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2023

Sedangkan dukungan anggaran baik APBD maupun APBN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Dukungan Anggaran APBD dan APBN Tahun 2023

A.	APBD	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9.336.615.118,-
2.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	524.999.700,-
3.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	591.246.230,-
4.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.000.000.000,-
5.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	732.851.800,-
	Jumlah	12.185.712.848,-
B.	APBN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.373.700.000,-
2.	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	468.329.000,-
3.	Perdagangan Luar Negeri	546.732.000,-
	Jumlah	2.388.761.000,-

Untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan pada tujuan dan sasaran strategis, dilaksanakan program kegiatan yang berkontribusi dalam rangka mewujudkan capaian target per sasaran. Program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program	Target	Kegiatan Pendukung	
1.	Terjaganya kestabilan harga barang dan terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Kenaikan Harga setiap Tahun	3 - 10	<ol style="list-style-type: none"> Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Tradisional Pasar Murah Bersubsidi 	
		a. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Cakupan pengambilan data harga (%)	100		
		- Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1		
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1		
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam Wilayah NTT	90		<ol style="list-style-type: none"> Hibah kepada Dekranasda Provinsi NTT
		a. Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)	100		
	- Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50			
2.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	56,7	<ol style="list-style-type: none"> Edukasi Konsumen 	
		a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program	Target	Kegiatan Pendukung
		- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pelaku Usaha maupun Konsumen yang telah teredukasi dan terberdayakan	50	
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (target 2023 = 34 pelaku usaha)	100	1. Layanan Kalibrasi
		a. Pelaksanaan Pengujian dan Serifikasi Mutu Produk di seluruh daerah kab/kota	Terlaksananya Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Produk di Seluruh Daerah Kab/Kota (%)	100	
		- Pengembangan layanan kalibrasi	Jumlah rekomendasi kalibrasi yang diterbitkan	15	
3.	Menguatnya peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan dengan Memanfaatkan Teknologi Industri	3,36	1. Fasilitas HKI Merek
		a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (%)	100	
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun

	Skala Pencapaian Kinerja	Kategori
Adapun penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut:	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
	$75\% \leq X < 85\%$	Berhasil
	$55\% \leq X < 75\%$	Cukup Berhasil
	$X < 55\%$	Belum Berhasil

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun berdasarkan hasil pengukurannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2022	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,21	1,25	1,31	100 %
		2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,05	12	12,52	100 %
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	100	3	23,56	100 %
RATA-RATA CAPAIAN							100 %

Dari rata-rata capaian kinerja diatas Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai **100 %** yang artinya masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

3.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 5 Program/Kegiatan yang bersumber pada APBD dan 3 Program/Kegiatan yang bersumber dari dana APBN. Namun dalam pelaksanaannya, anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami *redesign* (perubahan), tidak terkecuali anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat *redesign* (perubahan) anggaran. Salah satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023 adalah kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Pekososbud) yang dapat ikut memberikan kontribusi pada pemberdayaan pelaku usaha industri dan perdagangan.

Untuk melihat gambaran lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tabel 3.2 di atas, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS SATU

SASARAN STRATEGIS RPJMD	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan
SASARAN STRATEGIS RENSTRA	Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB
INDIKATOR KINERJA 1	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
INDIKATOR KINERJA 2	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama, yaitu meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Industri Pengolahan)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
		2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.676.518,62
2	Pertambangan dan Penggalian	1.344.110,15
3	Industri Pengolahan	1.687.747,72
4	Pengadaan Listrik dan Gas	116.794,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	72.187,70
6	Konstruksi	13.562.172,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.091.107,79
8	Transportasi dan Pergudangan	6.515.364,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	851.740,04
10	Informasi dan Komunikasi	8.965.971,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.607.232,06
12	Real Estate	3.056.603,76
13	Jasa Perusahaan	190.966,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15.944.265,67
15	Jasa Pendidikan	11.442.148,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.273.676,44
17	Jasa lainnya	2.124.526,68
	Total PDRB :	128.523.134,13

Sumber Data: PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Sehingga dari tabel di atas persentase kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB ADH Berlaku tahun 2023 dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian dapat dihitung realisasi indikator kinerja menjadi sebagai berikut:

$$\frac{1.687.747,72}{128.523.134,13} \times 100\% = 1,31\%$$

Maka Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2023			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,25	1,31	100

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.687.747,72 Juta atau sebesar 1,31 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp128.523.134,13 Juta sehingga realisasi lebih tinggi 0,06 persen dari target yang ditetapkan sebesar 1,25 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja ke satu, sehingga persentase capaiannya tetap dihitung sebesar 100 persen.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2023			
		Satuan	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,25	1,21	1,31

Pada tahun 2023, Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mengalami kenaikan sebesar 0,07% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023		Keterangan
		NTT	Nasional	
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB <i>*) Nas.: PDB sektor industri pengolahan non migas</i>	1,31	16,75	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Provinsi NTT (ADHB): <ul style="list-style-type: none"> - Total PDRB : Rp128.523,13 Milyar - PDRB Indutri Pengolahan : Rp1.687,75 Miyar ➤ Nasional (ADHB): <ul style="list-style-type: none"> - Total PDB : Rp20.892.377,00 Milyar - PDB Industri Pengolahan Non Migas : Rp3.499.615,00 Milyar
	- Nilai PDRB Industri Pengolahan (Rp. Milyar) <i>*) Nas.: PDB sektor industri pengolahan non migas</i>	1.687,75	3.499.615,00	Nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Provinsi NTT tahun 2023 mencapai Rp1.687,75 Milyar memberikan kontribusi sebesar 0,05% terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan non migas nasional yang mencapai nilai sebesar Rp3.499.615,00 Milyar

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023		Keterangan
		NTT	Nasional	
	- Pertumbuhan Nilai PDRB sub sektor industri pengolahan <i>*) Nas.: PDB sektor industri pengolahan non migas</i>	7,33%	4,69%	PDB Nasional (ADHK): Rp2.287.660,00 Milyar (2023) Rp2.185.263,00 Milyar (2022) PDRB Provinsi NTT (ADHK): Rp942,34 Milyar (2023) Rp877,99 Milyar (2022)

Sumber Data: BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 mencapai Rp1.687,75 Milyar dengan memberikan kontribusi sebesar 0,05% terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan non migas Nasional yang mencapai nilai sebesar Rp3.499.615,00 Milyar pada tahun yang sama. Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan mengalami peningkatan seiring dengan beberapa kebijakan terkait pemulihan ekonomi nasional khususnya di sektor industri. Adapun Pertumbuhan PDRB sub sektor industri pengolahan pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,33%.

➤ Faktor Pendukung

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berusaha dalam meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan yang telah didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:

- a. Ketersediaan sumber daya baik alam maupun tenaga kerja potensial;
- b. Dukungan Pemerintah Daerah melalui kolaborasi bersama dinas teknis terkait untuk mengalokasikan dan menganggarkan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas produk dan pelaku industri antara lain:
 - Memberikan fasilitasi pengurusan perijinan usaha industri yang dapat mendukung pertumbuhan industri yang legal di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Memberikan pelatihan dan bantuan peralatan yang mendukung berkembangnya usaha industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis teknologi industri;
- c. Tersedianya akses pasar bagi produk daerah melalui berbagai *marketplace* baik secara *online* maupun *offline*;

- d. Menciptakan peluang kerja bagi para pencari kerja produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

➤ **Faktor Penghambat**

Capaian indikator Persentase kontribusi Sektor Industri Pengolahan telah memenuhi target kinerja tahun 2023 namun pada perjalanannya terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai indikator kinerja ini. Dari hasil evaluasi, beberapa hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran startegis Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk;
- b. Pengolahan sumber daya alam belum optimal dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena masih banyak sumber daya alam dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah;
- c. Masih banyak potensi kerjasama antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan perusahaan besar dan BUMN yang belum difasilitasi oleh pemerintah;
- d. Sarana dan prasarana teknologi industri berbasis pengolahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memadai.

➤ **Solusi**

Untuk mengatasi kendala – kendala diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki solusi diantaranya:

- a. Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber daya industri;
- c. Membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis baik bagi tenaga penyuluh industri maupun pelaku usaha.

➤ **Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja**

Dalam mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan Program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini didukung oleh kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, serta sub kegiatan prioritas sebagai berikut :

⇒ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

a) Fasilitas HKI Merek

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Kupang pada tanggal 14 s/d 15 Desember 2023 bertempat di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. Kegiatan ini diikuti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) IKM/UKM yang berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Barat, Kabupten Flores Timur, dan Kabupaten Nagekeo. Hasil yang diperoleh melalui kegiatan ini adalah 47 IKM/UKM yang berasal dari Kota/Kabupaten mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT agar nama merek produk dari IKM/UKM bisa diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi NTT untuk didaftarkan.

1.2 Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Perdagangan)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
		2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.676.518,62
2	Pertambangan dan Penggalian	1.344.110,15
3	Industri Pengolahan	1.687.747,72
4	Pengadaan Listrik dan Gas	116.794,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	72.187,70

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
		2023
6	Konstruksi	13.562.172,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.091.107,79
8	Transportasi dan Pergudangan	6.515.364,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	851.740,04
10	Informasi dan Komunikasi	8.965.971,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.607.232,06
12	Real Estate	3.056.603,76
13	Jasa Perusahaan	190.966,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15.944.265,67
15	Jasa Pendidikan	11.442.148,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.273.676,44
17	Jasa lainnya	2.124.526,68
	Total PDRB	128.523.134,13

Sumber Data : PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Sehingga dari tabel di atas persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB ADH Berlaku tahun 2023 dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian dapat dihitung realisasi indikator kinerja menjadi sebagai berikut:

$$\frac{16.091.107,79}{128.523.134,13} \times 100\% = 12,52 \%$$

Maka Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2023			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12	12,52	100

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 adalah sebesar Rp16.091.107,79 Juta atau sebesar 12,52 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp128.523.134,13 Juta sehingga realisasi melebihi target yang ditetapkan sebesar 12 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja ke dua, sehingga persentase capaiannya tetap dihitung sebesar 100 persen.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2023			
		Satuan	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12	12,05	12,52

Pada tahun 2023, Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami kenaikan sebesar 0,47% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023		Keterangan
		NTT	Nasional	
1.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB <i>*) Nas.: PDB sektor perdagangan</i>	12,52	12,93	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Provinsi NTT (ADHB): <ul style="list-style-type: none"> - Total PDRB : Rp128.523,13 Milyar - PDRB Perdagangan : Rp16.091,11 Milyar ➤ Nasional (ADHB): <ul style="list-style-type: none"> - Total PDB : Rp20.892.377,00 Milyar - PDB Perdagangan : Rp2.702.446,00 Milyar
	- Nilai PDRB Perdagangan (Rp. Milyar) <i>*) Nas.: PDB sektor perdagangan</i>	16.091,11	2.702.446,00	Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Provinsi NTT tahun 2023 mencapai Rp16.091,11 Milyar memberikan kontribusi sebesar 0,59% terhadap PDB ADHB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor nasional yang mencapai nilai sebesar Rp2.702.446,00 Milyar
	- Pertumbuhan Nilai PDRB sub sektor perdagangan <i>*) Nas.: PDB sektor perdagangan</i>	5,50%	4,85%	PDB Nasional (ADHK): Rp1.604.114,00 Milyar (2023) Rp1.529.952,00 Milyar (2022) PDRB Provinsi NTT (ADHK): Rp9.282,59 Milyar (2023) Rp8.798,30 Milyar (2022)

Sumber Data: BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Provinsi Nusa

Tenggara Timur pada tahun 2023 mencapai Rp16.091,11 Milyar dengan memberikan kontribusi sebesar 0,59% terhadap PDB ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Nasional yang mencapai nilai sebesar Rp2.702.446,00 Milyar pada tahun yang sama. Pertumbuhan Kategori sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan seiring dengan beberapa kebijakan terkait pemulihan ekonomi nasional. Adapun Pertumbuhan PDRB sub sektor sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,50%.

➤ **Faktor Pendukung**

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 ditopang oleh tetap kuatnya kinerja sebagian besar lapangan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun pertumbuhan tersebut selain di topang oleh Industri Pengolahan, juga ditopang oleh sektor perdagangan. Pertumbuhan pada Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor didorong oleh masih positifnya penjualan kendaraan bermotor. Dengan didukung kemajuan teknologi, perdagangan juga semakin meningkat mengingat sudah banyak *platform* penjualan *online* yang di gunakan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperdagangkan usaha mereka.

➤ **Faktor Penghambat**

Melambatnya pertumbuhan Perdagangan ini sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipengaruhi oleh meningkatnya standar harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada saat-saat tertentu dikarenakan kelangkaan barang.

➤ **Solusi**

Untuk mengatasi kendala – kendala diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki solusi diantaranya:

- a. Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi pada Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor;

- b. Pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor;
- c. Fasilitasi pengembangan akses pasar dengan memanfaatkan berbagai jenis *platform* penjualan baik secara *online* maupun *offline*;
- d. Melakukan pengambilan data harga guna mengawasi adanya ketidakstabilan kenaikan atau penurunan harga di pasar-pasar tradisional;
- e. Melakukan pengendalian inflasi dengan mengadakan kegiatan pasar murah untuk masyarakat.

➤ **Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja**

Dalam mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan Program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- I. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Program ini didukung oleh kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, serta sub kegiatan prioritas sebagai berikut :

⇒ Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :

- a) Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan harga barang kebutuhan pokok secara periodik sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kenaikan atau penurunan harga di atas batas normal. Perhitungan Persentase kenaikan/penurunan harga setiap tahun dihitung dengan formula sebagai berikut yaitu :

$$\frac{\text{kenaikan/penurunan harga Tahun } n - (n - 1)}{\text{kenaikan/penurunan harga Tahun } n - 1} \times 100\%$$

Persentase rata-rata kenaikan/penurunan harga setiap tahun harus dipastikan berada di bawah 10% sehingga dapat dikategorikan masih stabil dan terkendali. Data harga diambil bersifat real time harian dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan. Hasil

perhitungan rata-rata kenaikan atau penurunan harga barang kebutuhan pokok selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Kenaikan/penurunan Harga Bahan Kebutuhan Pokok

No	Nama Bahan Pokok	Satuan	Harga (Rp)			Presentase (%)
			Tahun 2022	Tahun 2023	Selisih (Tahun n - (n - 1))	
1	Beras	kg	10.338	12.969	(+) 2.632	25,46%
2	Gula Pasir	kg	15.363	16.369	(+) 1.005	6,54%
3	Minyak Goreng	ltr	20.679	18.103	(-) 2.576	-12,46%
4	Tepung Terigu	kg	10.854	13.375	(+) 2.521	23,22%
5	Daging Ayam	kg	55.000	50.056	(-) 4.945	-8,99%
6	Telur	kg	47.608	51.276	(+) 3.667	7,70%
7	Cabe Merah	kg	56.149	57.703	(+) 1.553	2,77%
8	Cabe Rawit	kg	46.486	67.089	(+) 20.603	44,32%
9	Bawang Merah	kg	33.211	28.569	(-) 4.642	-13,98%
10	Bawang Putih	kg	37.458	38.303	(+) 845	2,25%
11	Susu	gr/kl	10.000	13.000	(+) 3.000	30,00%
12	Garam Beryodium	kg	10.000	10.000	0	0,00%
13	Mentega	kg	44.177	48.373	(+) 4.195	9,50%
14	Kacang Tanah	kg	30.000	35.989	(+) 5.989	19,96%
15	Kacang Hijau	kg	30.000	26.459	(-) 3.541	-11,80%
16	Mie Instan Kari Ayam	bks	2.500	3.000	(+) 500	20,00%
17	Ketela Pohon	kg	10.000	11.250	(+) 1.250	12,50%
18	Ikan Segar : Kembung/Tongkol/ Tuna/Cakalang	kg	36.250	43.999	(+) 7.749	21,38%
19	Jagung Pipilan Kering (Untuk Pangan, Bukan Untuk Pakan)	kg	9.716	9.056	(-) 660	-6,79%
Rata-rata :						9,03%

Keterangan :

- Harga di atas merupakan harga rata-rata per jenis bahan pokok
- Tanda (-) minus menunjukkan adanya penurunan harga dibandingkan dengan tahun lalu
- Tanda (+) plus menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan dengan tahun lalu

Dari data di atas bisa dilihat bahwa ada kenaikan harga pada bahan pokok dengan persentase rata-rata sebesar 9,03%. Kenaikan harga yang cukup besar terlihat pada komoditi cabai rawit. Hal ini dikarenakan turunnya produksi cabai disejumlah wilayah sentra akibat cuaca yang tidak menentu. Namun kenaikan harga ini bisa

dikendalikan dan tidak terlalu berdampak pada perekonomian masyarakat, situasi jual-beli di pasar-pasar tradisional tetap kondusif serta daya beli masyarakat tetap tinggi.

b) Pasar Murah Bersubsidi

Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi ini dilaksanakan sebagai langkah penanggulangan terjadinya inflasi pada tahun 2023. Pada kegiatan Pasar Murah Bersubsidi diberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan yang mengalami dampak inflasi daerah Tahun 2023.

Pasar Murah Bersubsidi di Kota Kupang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2023 bertempat di Gelanggang Olahraga (GOR) Oepoi – Kupang dengan melibatkan beberapa distributor di Kota Kupang yaitu Perum Bulog Divre NTT, Glory Swalayan dan PT. Nam. Metode pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi ini dilakukan melalui pendataan sasaran penerima bantuan dan pendistribusian kupon bantuan (*data collecting and coupon redemption*) oleh petugas dimasing-masing kelurahan, kemudian masyarakat akan mendapatkan kupon belanja bersubsidi yang dapat dibelanjakan atau ditukarkan sesuai dengan kebutuhan pokok yang diinginkan senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), nilai belanja di atas Rp100.000,- menjadi tanggungan masyarakat (penerima).

Tabel 3.12 Disribusi Kupon Belanja pada Kegiatan Pasar Murah

No.	Kelurahan	Jumlah Kupon
1	Fatululi	100
2	Oebobo	100
3	Oepura	100
4	Naikoten I	100
5	Fontein	100
6	Bonipoi	100
7	Airmata	100
8	Solor	100
9	Tode Kisar	100
10	Merdeka	100
Total		1000

II. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program ini didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut:

⇒ Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

a) Edukasi Konsumen

Maksud dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen serta pelaku usaha juga dapat memahami tentang setiap regulasi yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 31 Mei 2023 bertempat di Aula Hotel Timor Megah. Narasumber kegiatan Edukasi Konsumen ini adalah Drs. Gabrile Pakaenoni, M.Si selaku Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, C.A Fanggidae, S.TP selaku Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Joel Ndou dari Polres Timor Tengah Selatan. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 50 (lima puluh) orang. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian materi dari narasumber secara panel yang dipandu oleh moderator, kemudian dilanjutkan dengan babak diskusi/tanya jawab, penyampaian usul dan saran dari peserta kegiatan.

III. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk

Program ini didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di beberapa daerah di Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut:

⇒ Pengembangan Layanan Kalibrasi

Pada tahun 2023, UPTD PSMB telah melakukan kalibrasi terhadap alat-alat yang dimiliki oleh beberapa Badan Usaha dengan jumlah Surat Keterangan yang dikeluarkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) terhadap 17 Badan Usaha. Kalibrasi alat ukur perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan atau sistem dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan dalam pengukuran atau pengolahan data. Hasil pengukuran ini

akan menunjukkan kualitas maupun keamanan dari suatu produk. Berikut data badan usaha yang telah melakukan kalibrasi pada UPTD PSMB:

Tabel 3.13 Badan Usaha Yang Telah Melakukan Kalibrasi

No	Nama Badan Usaha	Lokasi Kalibrasi	Jumlah Alat	Jenis Alat
1	PT. PLN Persero UIP Nusa Tenggara	Kab. Kupang	1	Meter Arus Kerja
2	PT. Cahaya Berlian Jaya Abadi	Kab. Kupang	4	Timbangan Elektronik
			4	Alat Uji Tekan/Proving Ring
			1	Timbangan AMP
			2	Force Gauge
3	PT. Trans Data Sakomindo	Kota Kupang	1	Alat Uji Tekan/Cbr Test
4	PT. Brantas Abipraya	Kab. Nagekeo	3	Timbangan Elektronik
			1	Meter Arus Kerja
			1	Force Gauge
5	PT. Waskita Raya	Kab. Nagekeo	3	Timbangan Elektronik
			1	Alat Uji Tekan/Proving Ring Standar
			2	Alat Uji Tekan/Cbr Test
			1	Force Gauge
6	PT. Ramayana Cipta Perkasa	Kab. TTU	1	Timbangan Elektronik
			1	Timbangan AMP
			1	Alat Uji Tekan/Proving Ring Standar
			1	Alat Uji Tekan/Cbr Test
7	PT. Naviri Kabupaten Timor Tengah Utara	Kab. TTU	1	Alat Uji Tekan/Cbr Test
			1	Alat Uji tekan/Proving Ring
8	PT. Dian Nusa Lestari	Kab. Belu	2	Timbangan Elektronik
			2	Alat Uji Tekan/Proving Ring
9	PT. Pundi Mas Bahagia	Kab. Belu	3	Timbangan Elektronik
			2	Alat Uji Tekan/Marshal Test
			1	Force Gauge
			2	Alat Uji Tekan/Cbr Test
10	PT. Sari Kencana Mas	Kab. Belu	5	Timbangan Elektronik
			1	Force Gauge
			1	Timbangan AMP
			2	Alat Uji Tekan/ Marshal Test
			1	Alat Uji Tekan / Cbr
11	PT. Indo Jaya Perkasa	Kab. Ngada	1	Timbangan AMP
			2	Timbangan Elektronik

No	Nama Badan Usaha	Lokasi Kalibrasi	Jumlah Alat	Jenis Alat
			1	Alat Uji Tekan/ Marshal Test
			1	Timbangan Jembatan
			1	Alat Uji Tekan / Cbr
			1	Anak Timbangan
12	PT. Nunu Rada Raba	Kab. Ngada	1	Timbangan AMP
13	PT. Kencana Sakti Nusantara	Kab. Ngada	1	Timbangan Jembatan
			1	Timbangan AMP
14	CV. Cahaya Bintang Laut	Kota Kupang	4	Timbangan Elektronik
			4	Pressure Gauge/Control Panel
			6	Pressure Gauge/Fermentasi Tangki
			4	Pressure Gauge/Pasteurization
			1	Termometer
			1	Pipet
15	PT. Utama Karya	Kota Kupang	1	Auto Level
16	PT. Menara	Kab. Manggarai	2	Timbangan Elektronik
			2	Alat Uji Tekan / Proving Ring
17	PT. Floresco	Kab. Manggarai	2	Timbangan Elektronik
			2	Alat Uji Tekan / Proving Ring
TOTAL :			95 ALAT YANG DIKALIBRASI	

IV. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut:

- ⇒ Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi : Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberian Hibah sebesar Rp635.000.000,- kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk meningkatkan transaksi dan jaringan pemasaran produk daerah Provinsi NTT.

2. SASARAN STRATEGIS DUA

SASARAN STRATEGIS RPJMD	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional
SASARAN STRATEGIS RENSTRA	Meningkatnya nilai ekspor
INDIKATOR KINERJA 1	Persentase peningkatan nilai ekspor

Untuk meningkatkan nilai ekspor dalam mendukung perananan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perdagangan Regional, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama, yaitu Meningkatkan nilai ekspor. Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Peningkatan Nilai Ekspor

Nilai Ekspor Nonmigas Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Nilai Ekspor non migas (US \$) Tahun 2022 - 2023

No	Tahun	Nilai Ekspor nonmigas (US \$)
1.	2022	46.596.605
2.	2023	57.576.670

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sehingga dari tabel di atas Persentase peningkatan nilai ekspor tahun 2023 dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Nilai Ekspor Tahun } n - \text{Nilai Ekspor Tahun } (n - 1)}{\text{Nilai Ekspor Tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian dapat dihitung realisasi indikator kinerja menjadi sebagai berikut:

$$\frac{57.576.670 - 46.596.605}{46.596.605} \times 100\% = 23,56 \%$$

Maka Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	3	23,56	100

Persentase peningkatan nilai ekspor dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 adalah sebesar US\$10.980.065 atau sebesar 23,56 persen sehingga realisasi jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar 3 persen, sebagaimana pada sasaran strategis dua, indikator kinerja ke satu, sehingga persentase capaiannya tetap dihitung sebesar 100 persen.

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023		Keterangan
		NTT	Nasional	
1.	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor (Non Migas) *) <i>Nas.: Ekspor Non Migas</i>	23,56	-11,96	Ekspor Non Migas Nasional: US\$242.896.300.000 (2023) US\$275.906.100.000 (2022) Ekspor Non Migas Provinsi NTT: US\$57.576.670 (2023) US\$46.596.605 (2022)
	- Nilai ekspor Non Migas (US\$) *) <i>Nas.: Ekspor Non Migas</i>	57.576.670	242.896.300.000	Nilai Ekpor Non Migas di Provinsi NTT tahun 2023 mencapai US\$57.576.670 memberikan kontribusi sebesar 0,024% terhadap Nilai Ekpor Non Migas Nasional yang mencapai nilai sebesar US\$242.896.300.000
	- Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Non Migas terhadap total Nilai Ekspor	95,88	93,85	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Provinsi NTT <ul style="list-style-type: none"> - Ekspor Non Migas : US\$57.576.670 - Total Ekspor : US\$60.047.469 ➤ Nasional: <ul style="list-style-type: none"> - Ekspor Non Migas : US\$242.896.300.000 - Total Ekspor : US\$258.818.900.000

Sumber Data: BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Secara kumulatif, nilai ekspor non migas NTT Tahun 2023 mencapai US\$57.576.670 atau naik 23,56 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Nilai Ekpor Non Migas di Provinsi NTT tahun 2023 mencapai US\$57.576.670 memberikan

kontribusi sebesar 0,024% terhadap Nilai Ekpor Non Migas Nasional yang mencapai nilai sebesar US\$242.896.300.000.

➤ **Faktor Pendukung**

Komoditas terbesar ekspor NTT adalah komoditas non migas. Komoditas ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimuat melalui pelabuhan di Nusa Tenggara Timur dikirim ke Timor Leste. Selain ekspor melalui pelabuhan di NTT, ekspor komoditas asal NTT juga dilakukan melalui pelabuhan di luar NTT. Tercatat total ekspor ke 10 negara tujuan pada 2023 yaitu Timor Leste, Vietnam, Japan, China, India, Australia, Taiwan, Republic of Korea, Singapore, dan Malaysia. Kondisi peningkatan nilai ekspor tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai ekspor ke beberapa negara utama. Pada periode Januari–Desember 2023, Timor Leste masih merupakan negara tujuan ekspor yang memiliki peranan terbesar, diikuti Vietnam dan China.

Gambar 3.1 Nilai Ekspor Provinsi Asal Menurut Negara Tujuan Tahun 2023

Negara Tujuan (1)	Nilai FOB (US\$) 2023		Perubahan		Nilai FOB (US\$) Januari-Desember		Perubahan % (8)	Peran Thd Total 2023 (%) (9)
	Nov (2)	Des (3)	Nilai (4)	% (5)	2022 (6)	2023 (7)		
Timor Leste	5.345.374	4.940.990	-404.384	-7,57	89.276.954	57.189.186	-35,94	77,19
Vietnam	2.118.652	1.933.101	-185.551	-8,76	2.568.151	6.309.788	145,69	8,52
Australia	46.479	87.674	41.195	88,63	675.750	505.537	-25,19	0,68
China	250.461	73.160	-177.301	-70,79	3.368.950	2.425.197	-28,01	3,27
Korea Selatan	20.806	38.050	17.244	82,88	4.795.466	746.531	-84,43	1,01
Singapura	18.885	28.522	9.637	51,03	805.115	307.689	-61,78	0,42
Taiwan	26.253	24.895	-1.358	-5,17	3.081.646	728.629	-76,36	0,98
Amerika Serikat	12.741	24.259	11.518	90,40	1.741.438	922.251	-47,04	1,24
United Kingdom	7	20.605	20.598	292.580	9	169.768	1.804.019,36	0,23
Jepang	797.823	20.489	-777.335	-97,43	1.378.956	2.069.458	50,07	2,79
Total 10 Negara	8.637.481	7.191.744	-1.445.737	-16,74	107.692.436	71.374.035	-33,72	96,34
Lainnya	163.736	37.915	-125.821	-76,84	3.742.023	2.712.310	-27,52	3,66
Total Ekspor	8.801.217	7.229.659	-1.571.558	-17,86	111.434.459	74.086.345	-33,52	100,00

Sumber Data : BPS Provinsi NTT, 2023

Persentase peningkatan terbesar ekspor nonmigas Desember 2023 terhadap November 2023 terjadi pada kelompok komoditas Benda-benda dari Besi dan Baja (73) yang naik sebesar US\$70.865 (naik 54,51 persen), sedangkan persentase penurunan terbesar terjadi pada kelompok komoditas Minuman (22) yang turun US\$94.776 (turun 24,82 persen). Komoditas lain dengan persentase peningkatan nilai ekspor terbesar kedua adalah kelompok komoditas Plastik dan Barang dari

Plastik (39), kelompok komoditas Perabot, Penerangan Rumah (94), dan kelompok komoditas Kendaraan dan Bagiannya (87).

Selama Januari–Desember 2023, ekspor dari 10 golongan barang (HS 2 digit) memberikan kontribusi 63,77 persen terhadap total ekspor nonmigas. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 Kelompok komoditas tersebut naik 30,67 persen terhadap periode yang sama tahun 2022.

Gambar 3.2 Nilai Ekspor Sepuluh Kelompok Komoditas Non Migas NTT 2023

Kelompok Komoditas	Nilai FOB (US\$)		Perubahan		Nilai FOB (US\$)		Perubahan (%)	Peran Thd Jan-Des 2023 (%) *)
	2023		Nilai	%	Januari-Desember			
	Nov	Des			2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perabot, Penerangan Rumah (94)	513.944	736.449	222.505	43,29	4.546.541	6.007.972	32,14	10,43
Olahan dari Tepung (19)	590.237	481.695	-108.542	-18,39	3.822.051	6.456.807	68,94	11,21
Kendaraan dan Bagiannya (87)	374.410	399.433	25.023	6,68	2.736.927	4.260.505	55,67	7,40
Garam, Belerang, Kapur (25)	451.936	371.361	-80.575	-17,83	2.819.212	4.165.280	47,75	7,23
Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian (33)	352.521	352.730	209	0,06	2.440.550	2.704.453	10,81	4,70
Susu, Mentega, Telur (04)	357.396	293.649	-63.747	-17,84	3.677.159	4.999.267	35,95	8,68
Minuman (22)	381.801	287.026	-94.776	-24,82	5.132.393	3.294.401	-35,81	5,72
Benda-benda dari Besi dan Baja (73)	130.004	200.869	70.865	54,51	687.892	1.259.065	83,03	2,19
Berbagai Makanan Olahan (21)	165.691	159.632	-6.059	-3,66	988.509	2.028.740	105,23	3,52
Plastik dan Barang dari Plastik (39)	100.249	145.287	45.038	44,93	1.246.648	1.539.498	23,49	2,67
Total 10 Kelompok Komoditas	3.418.190	3.428.131	9.942	0,29	28.097.881	36.715.988	30,67	63,77
Lainnya	1.813.676	1.427.039	-386.637	-21,32	18.498.724	20.860.681	12,77	36,23
Total Eskpor Non Migas	5.231.866	4.855.171	-376.695	-7,20	46.596.604	57.576.670	23,56	100,00

Sumber Data : BPS Provinsi NTT, 2023

Selama Tahun 2023, ekspor non migas Nusa Tenggara Timur jauh meningkat dibanding periode yang sama pada 2022. Hal ini dikarenakan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian mitra dagang utama Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama Timor Leste. Hal tersebut menunjukkan pemulihan perekonomian dari efek pandemi COVID-19 yang sempat menghambat pertumbuhan ekspor di Tahun 2021.

➤ Faktor Penghambat

Faktor penghambat meningkatnya nilai ekspor adalah sebagai berikut:

1. Pola pikir konsumen yang lebih cenderung ke produk impor;

2. Masih minimnya informasi serta perkembangan pasar potensial bagi produk ekspor daerah pada negara tujuan ekspor yang diperoleh para eksportir di dalam daerah;
3. Masih kurangnya Program/Kegiatan yang mendukung peningkatan ekspor yang dapat diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Masih kurangnya sinergitas dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya peningkatan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

➤ **Solusi**

Solusi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan eksportir, kerjasama, dan pengawasan terhadap eksportir;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana eksportir;
3. Mendorong IKM agar dapat mengekspor produknya guna perluasan pasar produknya.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memuat alokasi target penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 3.17
Target Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

No.	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a)Belanja (Program)	Rp. 12.185.712.848 ,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 9.336.615.118 ,-	Realisasi minimal 90%
	2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 524.999.700 ,-	Realisasi minimal 85%
	3. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 591.246.230 ,-	Realisasi minimal 85%
	4. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 1.000.000.000 ,-	Realisasi minimal 85%
	5. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 732.851.800 ,-	Realisasi minimal 85%
	b)Pendapatan	Rp. 504.000.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 12.689.712.848 ,-	
2)	APBN		
	Program	Rp. 2.388.761.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 1.373.700.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 468.329.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	3. Perdagangan Luar Negeri	Rp. 546.732.000 ,-	Realisasi minimal 90%

Sumber Data : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2023

3.3.1 Anggaran bersumber dari APBD

Tahun Anggaran 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat total anggaran dari APBD (setelah perubahan) sebesar **Rp12.185.712.848,-** (Dua belas miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp9.062.951.522,-** (Sembilan miliar enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) atau (74,37%), dengan rincian realisasi anggaran per program/kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.18
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD TA 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Rp	Fisik (%)	Keu (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9.336.615.118,-	8.129.817.242,-	100	87,07
2.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	524.999.700,-	135.324.200,-	100	25,78
3.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	591.246.230,-	99.054.080,-	100	16,75
4.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.000.000.000,-	635.000.000,-	100	63,50
5.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	732.851.800,-	63.756.000,-	100	8,70
	Total :	12.185.712.848,-	9.062.951.522,-	100	74,37

Rincian realisasi belanja yang bersumber dari APBD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19
Rincian Realisasi Belanja APBD TA 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2023		12.185.712.848	9.062.951.522	74,37
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.336,615.118	8.129.817.242	87,07
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.906.320	49.885.400	41,95
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.367.023.800	5.452.756.820	85,64
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.775.700	7.499.000	96,44
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342,048,760	250,370,528	74,14
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.550.000	0	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.276.711.738	2.211.906.120	97,15

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	(%)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		215.598.800	154.189.874	71,52
II	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		524.999.700	135.324.200	25,78
1	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		524.999.700	135.324.200	25,78
1.1	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kab/Kota dalam 1 Provinsi		524.999.700	135.324.200	25,78
III	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		591.246.230	99.054.080	16,75
1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		24.999.900	16.987.800	67,95
1.1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		24.999.900	16.987.800	67,95
2	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kab/Kota		566.246.330	82.066.280	14,49
2.1	Pengembangan Layanan Pengujian		206.890.540	0	0
2.2	Pengembangan Layanan Kalibrasi		359.355.790	82.066.280	22,84
IV	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		1.000.000.000	635.000.000	63,50
1	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		1.000.000.000	635.000.000	63,50
1.1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi		1.000.000.000	635.000.000	63,50
V	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		732.851.800	63.756.000	8,70
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		732.851.800	63.756.000	8,70
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		33.761.300	33.756.000	99,98
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		699.090.500	30.000.000	4,29

3.3.2 Anggaran bersumber dari APBN

Tahun Anggaran 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT mendapat total anggaran dari Dana Dekonsentrasi dengan total anggaran sebesar **Rp2.388.761.000,-** (Dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah). Realisasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebesar **Rp2.382.002.268,-** (Dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar **99,72%**.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.20
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBN TA 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Reliasasi (Rp)	%
1	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.373.700,000,-	1.367.126.300,-	99,52
2	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	468.329.000,-	468.156.880,-	99,96
3	Perdagangan Luar Negeri	546.732.000,-	546.719.088,-	99,99
	Total :	2.388.761.000,-	2.382.002.268,-	99,72

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Secara umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diemban. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan kategori **Sangat Berhasil** atau **100%** meski demikian, pencapaian Indikator Kinerja Utama akan terus menjadi prioritas dan perhatian untuk ditingkatkan pada tahun berikutnya.

4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Pencapaian kinerja sektor industri dan perdagangan menunjukkan trend yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sektor industri dan perdagangan diantaranya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Pertumbuhan sub sektor Industri Pengolahan di Pariwisata *Estate*;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta Penguasaan teknologi Industri;
3. Beban biaya bahan baku menjadi pendorong utama kenaikan total biaya produksi industri pengolahan;
4. Masih relatif tingginya biaya produksi dan menurunnya permintaan pasar;
5. Neraca perdagangan luar negeri daerah yang defisit diakibatkan karena nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor;
6. Belum efisiennya sistem logistik dan konektivitas antar daerah;
7. Kapasitas Sumber Daya Manusia IKM/UKM yang belum memadai;
8. Hasil produk unggulan belum dapat bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain:

- 1) Ketersediaan informasi data harga pasar secara *real time* untuk seluruh daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2) Terus membangun koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di daerah dalam hal sinkronisasi program/kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara berkelanjutan;
- 4) Melaksanakan fasilitasi sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang bertujuan untuk memberdayakan Industri dalam negeri dan memperkuat struktur Industri;
- 5) Memacu pertumbuhan industri menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dan mengurangi defisit neraca perdagangan.

LAMPIRAN
LEMBAR VERIFIKASI
LEVEL 1

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Reviewer : Sekretaris

Catatan Koreksi :

- Pengantar: Bentuk ulian, ada kesalahan pengejaan
- Kata sudah disingkat LKIP selanjutnya tidak perlu ditulis kepanjangannya lg
- Halaman 2, 8, 9, 11, 13, 55, 56
- Bagian struktur di halaman 4 dibuat judul gambar
- Uraian rekomendasi terkait usulan kegiatan selanjutnya

Kupang, Januari 2024

Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Veroliene Etlisye Foenay, ST, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19830510 200501 2 016

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

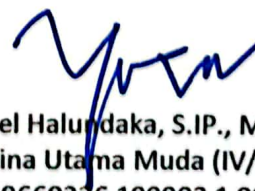
Reviewer : Plt. Kepala Dinas

Catatan Koreksi :

- pada nama file perlu menggunakan huruf tebal (bold)
- pada cover di belakang nama kelasnya bar (...)

Kupang, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Semuel Halundaka, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660226 199903 1 002

**LAMPIRAN
PERJANJIAN
KINERJA 2023**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**

Provinsi Nusa Tenggara Timur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Viktor Bungtilu Laiskodat**

Jabatan : **Gubernur Nusa Tenggara Timur**


selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

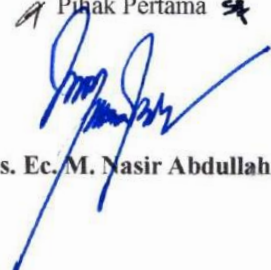
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

27 Januari 2023

Pihak Kedua


Viktor Bungtilu Laiskodat

Pihak Pertama


Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,19	1,25	$\frac{\text{Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,16	12	$\frac{\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	100	3	$\frac{\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } (n-1)}{\text{Nilai ekspor tahun } (n-1)} \times 100\%$

B. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

No.	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 11,916,840,760 ,-	Realisasi minimal 85%

	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	9,738,519,860 ,-	Realisasi minimal 90%
	2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	24.999.700 ,-	Realisasi minimal 90%
	3. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	876,822,200 ,-	Realisasi minimal 90%
	4. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	1.000.000.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	5. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	276.499.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	b) Pendapatan	Rp.	1.500.000.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp.	13.416.840.760 ,-	
2)	APBN			
	Program	Rp.	2,556,760,000 ,-	Realisasi minimal 90%
	1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	1.373.700.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	2. Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	468.329.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	3. Perdagangan Luar Negeri	Rp.	714.731.000 ,-	Realisasi minimal 90%

C. Belanja pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi E-Purchasing;

D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 28 Februari 2023;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);

F. Nilai PMPRB Minimal Kategori A (> 80 -90);

G. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;

H. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut :

1. TL temuan tahun 2022: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
2. TL temuan dibawah tahun 2022: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

- I. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis dan yang diusul pada pelaksanaan kompetisi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/LSM minimal 2 (dua);
- J. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;
- K. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- L. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Infromatif;
- M. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

27 Januari 2023

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM

NIP : 19631016 199203 1 005

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini menyatakan bahwa saya siap mengundurkan diri dari jabatan yang saya duduki saat ini terhitung mulai tanggal karena tidak mencapai target sesuai Perjanjian Kinerja yang telah saya perjanjikan dan hal-hal lain menurut pertimbangan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai wujud komitmen pelaksanaan Perjanjian Kinerja.

27 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Semuel Halundaka, S.IP., M.Si**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ayodhia G. L. Kalake**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 7 Desember 2023

Pihak Kedua

Ayodhia G. L. Kalake

Pihak Pertama

Semuel Halundaka, S.IP., M.Si

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Keuangan	

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL		TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,21	1,25		$\frac{\text{Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,05	12		$\frac{\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	100	3		$\frac{\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } (n-1)}{\text{Nilai ekspor tahun } (n-1)} \times 100\%$

B. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

No.	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 12.185.712.848 ,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 9.336.615.118 ,-	Realisasi minimal 90%

	2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	524.999.700,-	Realisasi minimal 85%
	3. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	591.246.230,-	Realisasi minimal 85%
	4. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	1.000.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	5. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	732.851.800,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp.	504.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp.	12.689.712.848,-	
2)	APBN			
	Program (Dekonsentrasi)	Rp.	2.388.761.000,-	Realisasi minimal 90%
	1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	1.373.700.000,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	468.329.000,-	Realisasi minimal 90%
	3. Perdagangan Luar Negeri	Rp.	546.732.000,-	Realisasi minimal 90%

C. Belanja menggunakan Aplikasi E-Purchasing minimal 40% dari Pagu belanja Pengadaan barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 04 Februari 2023;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);

F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;

G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut :

1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) Jenis;

- I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;
- J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);
- L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 7 Desember 2023

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,








Ayodhia G. L. Kalake

Plt. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Semuel Halundaka, S.IP., M.Si

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Keuangan	



**LAMPIRAN
FOTO KEGIATAN**

KEGIATAN FASILITASI MEREK

Hari/tanggal : Kamis, 14 Desember 2023

Tempat : Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT



Hari/tanggal : Jumat, 15 Desember 2023

Tempat : Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT



KEGIATAN PASAR MURAH

Hari/tanggal : Jumat, 29 Desember 2023

Tempat : Gelanggang Olahraga (GOR) Oepoi – Kupang





KEGIATAN PENGAMBILAN DATA HARGA

Hari/tanggal : Setiap Hari

Tempat : Pasar Penfui, Oesapa, Kuanino



KEGIATAN EDUKASI KONSUMEN

Hari/tanggal : Soe, 31 Mei 2023

Tempat : Aula Hotel Timor Megah Kabupaten Timor Tengah Selatan

